

Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan per Triwulan	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	%	100	100	TW 1	25	25	100	<p>Keterangan : Meta indikator tahunan : (Target kinerja sebesar 100% dengan meta indikator sebagai berikut : 1. Meningkatnya PAD (bobot 20%) 2. APBD yang Tepat Waktu dan Akurat (bobot 20%) 3. Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (bobot 20%) 4. Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akurat (bobot 20%) 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Konsisten (bobot 20%) = 20%+20%+20%+20%+20%= 100%. Secara kualitatif capaian kinerja pada triwulan I tahun 2024 sebesar 25% dengan formulasi penghitungan sebagai berikut : Meningkatnya PAD (bobot 5%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot 1%) 3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (bobot 4%) 4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot 6%) 5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (bobot 5%), secara kualitatif = 5% + 1% + 8% + 6% + 5% = 25%</p> <p>Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja pada masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut : 1. Meningkatnya PAD dengan bobot kinerja yang dihitung secara kualitatif sebesar 5% Meta indikator meningkatnya PAD, digunakan untuk mengetahui besaran kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (2024) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya (2023) sbb : Realisasi PAD Pemda pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp 637.449.751.967,71,- sedangkan realisasi PAD Pemda pada triwulan I tahun 2023 sebesar Rp594.623.711.960,55 dengan demikian terdapat kenaikan pada triwulan 1 tahun 2024 dibanding triwulan 1 tahun 2023 sebesar Rp42.826.040.007,16 (secara kualitatif telah tercapai 5%) Upaya yang dilakukan yaitu : a. Penyusunan Regulasi pengelolaan pendapatan daerah sebagai turunan dari Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang c. Meningkatkan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah. d. Mendorong penerapan sistem pembayaran pendapatan asli daerah secara nontunai e. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan asli daerah f. Kerjasama dengan institusi di luar lingkup Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (unsur Kepolisian dan Jasa Raharja), serta swasta (dealer otomotif) diperlukan dalam rangka ketercapaian PAD yang berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.</p> <p>2. APBD yang tepat waktu dan akurat dengan bobot kinerja sebesar 1%. Terkait dengan penganggaran, BPKA telah melakukan tindak lanjut Surat Edaran Sekda DIY Nomor 00.7/664 tanggal 26 Januari 2024 tentang Rasionalisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 dengan melakukan inventarisasi potensi rasionalisasi 2024 terhadap komponen belanja subkegiatan. untuk aktifitas fisik yang telah dilakukan yaitu : a. Penggandaan Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD TA.2024 dan Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA.2024 b. Koordinasi Penyusunan Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD TA.2024 c. Koordinasi Penyusunan RKPD Tahun 2025 bersama dengan TAPD d. Publikasi Perda DIY tentang APBD Tahun 2024 dan Pergub DIY tentang Penjabaran APBD Tahun 2024 melalui website.</p> <p>3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel dengan bobot kinerja sebesar 8%. Secara umum proses penyusunan LKPD Pemda DIY Tahun 2023 melalui aplikasi SIPD cukup lancar karena aplikasi SIPD 2023 sudah bisa menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan. BPKA selaku konsolidator penyusunan LKPD Pemda DIY melakukan konsolidasi dengan OPD Pemda DIY dalam menyusun LKPD Unaudited. LK Pemda DIY UnAudited 2023 yang sudah diperbaiki sesuai dengan hasil review inspektorat kemudian diserahkan ke BPK. Pada tahun 2024, Pemda DIY menjadi pemerintah daerah setingkat provinsi yang paling awal di Indonesia yang menyerahkan LKPD Tahun 2023 kepada BPK, yaitu pada tanggal 7 Februari 2024. Setelah melakukan pemeriksaan terinci terhadap LKPD UnAudited Pemda DIY tersebut, BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang akan menjadi dasar opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda DIY. Kemudian pada tanggal 4 April 2024 diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY Tahun Anggaran 2023 kepada DPRD DIY dan Gubernur DIY.</p> <p>4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat dengan bobot kinerja sebesar 5%. Upaya yang telah dilakukan di triwulan I yaitu : a. Telah dilakukan verifikasi dan pengesahan DPA Pergeseran OPD lingkup Pemda DIY setelah sebelumnya dilakukan pencermatan terhadap usulan pergeseran DPA maupun anggaran kas. Pengesahan/penerbitan DPA Pergeseran diikuti dengan pembuatan dan pencetakan SPD. Untuk tahun 2024 penandatanganan SPD sudah menggunakan tanda tangan elektronik. b. Melaksanakan amanat SE Edaran Sekda DIY Nomor 00.7/664 tanggal 26 Januari 2024 tentang Rasionalisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 dengan menyelenggarakan koordinasi antara TAPD dengan OPD pengusul. c. Melaksanakan penatausahaan keuangan daerah terhadap belanja dan rekonsiliasi pajak Pusat</p> <p>5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten dengan bobot kinerja sebesar 5%. Upaya yang telah dilakukan di triwulan I yaitu : a. Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan penyusunan surat Kepala BPKA DIY perihal permohonan personil tim evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota nomor 100.3.2/2137 tanggal 8 Maret 2024 yang ditujukan kepada OPD-OPD tim evaluasi di Pemda DIY. b. Audit BUKP dalam proses. Sampai dengan triwulan 1 berakhir masih dalam tahap draft laporan audit. c. Penyesuaian dokumen anggaran kas terkait dengan NA dan Raperda Pembentukan PT LKM BUKP dari bulan Mei menjadi bulan September 2024. d. Seleksi administrasi Direksi dan Komisaris PT Tarumartani sudah selesai dilakukan. Saat ini sedang dalam proses assesment di BKD DIY. e. Penyesuaian angkas Dana Bergulir (Pengeluaran Pembiayaan) dari bulan Juni menjadi bulan Mei 2024. f. Pembahasan Peraturan Gubernur tentang Sisdur saat ini masih dalam proses di Kemendagri. Harapannya setelah fasilitasi non formal di Kemendagri dapat segera ditetapkan. Disamping itu terdapat beberapa penyesuaian draft pergub dimaksud.</p> <p>Faktor Pendorong : - Koordinasi yang baik antara OPD yang satu dengan yang lainnya beserta dengan bidang-bidang di BPKA DIY. - Pelaksanaan aktivitas tetap berpedoman pada dokumen DPA dan anggaran kas yang telah ditentukan. - Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Meta indikator : 1. Meningkatnya PAD (bobot 20%) 2. APBD yang Tepat Waktu dan Akurat (bobot 20%) 3. Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (bobot 20%) 4. Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akurat (bobot 20%) 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Konsisten (bobot 20%) Secara kualitatif target capaian kinerja tahunan sebesar 100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan per Triwulan	Keterangan
										Faktor Penghambat : 1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Penyusunan Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD TA.2024 mengalami penundaan karena terkendala SIPD	

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan per Triwulan	Keterangan
						TW 2	54	54	100	<p>Keterangan : Meta indikator tahunan : (Target kinerja sebesar 100% dengan meta indikator sebagai berikut : 1. Meningkatnya PAD (bobot 20%) 2. APBD yang Tepat Waktu dan Akurat (bobot 20%) 3. Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (bobot 20%) 4. Penatausahaan Keuangan Daerah yang Akurat (bobot 20%) 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Konsisten (bobot 20%) = 20%+20%+20%+20%+20%= 100%. Secara kualitatif capaian kerjas sebesar 54% dengan formulasipenghitungan sebagai berikut : Meningkatnya PAD (bobot 10%) 2. APBD yang tepat waktu dan akurat (bobot 7,5%) 3. Laporan keuangandaerah yang akuntabel (bobot 17,5%) 4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (bobot 15%) 5. Pembinaan pengelolaan keuangandaerah yang konsisten (bobot 15%), secara kualitatif = 10% + 7,5% + 17,5% + 15% + 15% = 54% Penjelasan masing-masing meta indikator sbb :</p> <p>1. Meningkatnya PAD (secara kualitatif telah tercapai : bobot 10%) Meta indikator meningkatnya PAD, digunakan untuk mengetahui besaran kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan (2023) dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya (2022) sbb: Realisasi PAD Pemda pada triwulan 2 tahun 2024 sebesar Rp1.199.555.396.982,07 sedangkan realisasi PAD Pemda pada triwulan 2 tahun 2023 sebesar Rp1.157.400.061.941,44 dengan demikian terdapat kenaikan sebesar Rp42.155.335.040,63 pada triwulan 2 tahun 2024 Realisasi PAD Pemda pada triwulan 2 tahun 2024 sebesar Rp1.199.555.396.982,07 sedangkan realisasi PAD Pemda pada triwulan 2 tahun 2023 sebesar Rp1.157.400.061.941,44 dengan demikian terdapat kenaikan sebesar Rp42.155.335.040,63 pada triwulan 2 tahun 2024. Upaya yang telah dilakukan Koordinasi dengan OPD Pengelola DAK Fisik dan Kanwil DJPb DIY berjalan dengan lancar Koordinasi dengan OPD Pengelola DAK Nonfisik berjalan dengan lancar Rapat Koordinasi berjalan dengan baik antara Pemerintah Kab/Kota dan Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat yaitu DJPK Kementerian Keuangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran DAK Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2024 Rapat Koordinasi Pengembalian Dana BOSP Pengisian Rincian Realisasi Transaksi Keuangan Daerah untuk setiap kanal pembayaran pada semester I telah selesai sehingga tercapainya Laporan Indeks ETPD Semester I Rapat Koordinasi Penggunaan Sisa DBH CHT TA 2023 dan Tambahan DBH CHT</p> <p>2. APBD yang tepat waktu dan akurat (6%) - Menyelesaikan penyusunan Pergub No 23 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Pergub No 92 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA. 2024 - Proses perencanaan penganggaran saat ini dalam tahap koordinasi persiapan penyusunan KUA PPAS 2025 bersama dengan TAPD setelah RKPDIY Tahun 2025 tersusun. - APBD Pergeseran tahap 1 telah terselesaikan pada Bulan April. Saat ini sedang berproses penyusunan APBD Pergeseran tahap 2 setelah diselesaikannya penyusunan Berita Acara Pembahasan Dana Keistimewaan.</p> <p>3. Laporan keuangan daerah yang akuntabel (14%) - Menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 audited dan telah memperoleh opini WTP yang ke-14 kali secara berturut-turut - Menyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Raperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Proses penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis 2024</p> <p>4. Penatausahaan keuangan daerah yang akurat (12%) - Telah melakukan verifikasi dan pengesahan DPA Pergeseran yang ke-1 pada Bulan April 2024 setelah sebelumnya dilakukan pencermatan terhadap usulan pergeseran DPA maupun anggaran kas. Pengesahan/penerbitan DPA Pergeseran diikuti dengan pembuatan dan pencetakan SPD. - Terselenggaranya penandatanganan berita acara rekonsiliasi penyetoran pajak pusat antara Pemda DIY dengan KPP Pratama Yk dan KPPN - Telah menerbitkan dokumen SP2D atas pengajuan SPP/ SPM yang dinyatakan lengkap dan sah dimana pemungutan dan pemotongan pada SP2D, serta penyetoran kepada pihak ketiga seperti Taspen, Kantor Pajak, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dapat dibayarkan</p> <p>5. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah yang konsisten (12%) Upaya yang telah dilakukan yaitu : - Menyelesaikan seleksi calon Direksi dan Komisaris PT Tarumartani periode tahun 2024-2028. Dewan Direksi dan Komisaris Utama PT Taru Martani Periode Tahun 2024-2028 telah dilantik oleh Bapak Gubernur Hamengku Buwono IX pada tanggal 9 Juli 2023. - Audit KAP terhadap laporan keuangan BUKP telah selesai dilaksanakan - Pada tanggal 14 sampai dengan 20 Mei 2024 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPK BLUD Triwulan 1 Tahun 2004 pada SMK N 3 Wonosari, SMK N 6 Yogyakarta, BLPT, Bapelkes, Balabkes, RS Respira dan RS Jiwa Grhasia</p> <p>Faktor Pendorong : - Koordinasi yang baik antara OPD yang satu dengan yang lainnya beserta dengan bidang-bidang di BPKA DIY. - Pelaksanaan aktivitas tetap berpedoman pada dokumen DPA dan anggaran kas yang telah ditentukan. - Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Faktor Penghambat : 1. Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah 2. Penyusunan Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD TA.2024 mengalami penundaan karena terkendala SIPD</p>	
						TW 3	72	0	0	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong :</p>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan per Triwulan	Keterangan
										- Faktor Penghambat : -	
						TW 4	100	0	0	Keterangan : - Faktor Pendorong : - Faktor Penghambat : -	

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan per Triwulan	Keterangan
2	Optimalisasi aset Pemda DIY	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rupiah	9378609475	2545524976	TW 1	2598841800	2545524976	97.95	<p>Keterangan : Meta Indikator : nilai rupiah optimalisasi barang milik daerah. Realisasi optimalisasi aset Pemda DIY pada triwulan I tahun 2024 sejumlah Rp2.545.524.976,- berasal dari : a. Retribusi daerah senilai: Rp.115.049.022,- b. Hasil penjualan yang tidak dipisahkan 1.861.427.216,- c. Denda retribusi jasa usaha : Rpp 733.740,- d. Sewa tanah bangunan : Rp. 568.315.000,-</p> <p>Upaya yang telah dilakukan : a. Dilakukan perpanjangan perjanjian pemanfaatan rumah dinas b. Dilakukan sewa terhadap BMD idle yang belum dipergunakan untuk tugas dan fungsi OPD c. Pada Triwulan I Tahun 2024 telah dilakukan penjualan BMD berupa kendaraan, bahan bekas bangunan dan penjualan aset lainnya d. Optimalisasi BMD berupa mall dan hotel yang berada di Jl. Malioboro 52-58 sedang proses konsolidasi dengan PT AMI, yang mana bangunan menjadi satu dengan BMD Pemda DIY (bentuk Perjanjian Kerjasama). Sampai saat ini sudah dilakukan rapat awal dengan panitia pemilihan mitra KSP dan koordinasi untuk memperoleh masukan Tim KSP Pemda DIY</p> <p>Faktor Pendorong : - Penyempurnaan regulasi tentang pemanfaatan barang milik daerah - Koordinasi yang lebih intensif antara Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pemanfaatan barang milik daerah (pemanfaatan oleh swasta oleh Pengguna Barang) - Upaya intensifikasi dalam pemungutan dan penagihan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah</p> <p>Faktor Penghambat : Terdapat banyak peserta lelang yang mendaftar (setor jaminan penawaran), tapi tidak semuanya memasukkan surat penawaran.</p>	Meta indikator : Nilai rupiah optimalisasi Barang Milik Daerah
						TW 2	2930883600	8210868466	280.15	<p>Keterangan : Meta Indikator : nilai rupiah optimalisasi barang milik daerah. Realisasi optimalisasi aset Pemda DIY sampai dengan triwulan II tahun 2024 sejumlah Rp 8.210.868.466,- berasal dari : a. Retribusi daerah senilai : Rp. 163.693.730,- b. Hasil penjualan yang tidak dipisahkan Rp 2.643.637.216,- c. Denda retribusi jasa usaha : Rp 1.452.250,- d. Sewa tanah bangunan : Rp. 5.402.085.000,-</p> <p>Upaya yang telah dilakukan : - Optimalisasi BMD berupa mall dan hotel yang berada di Jl. Malioboro 52-58 sedang dilakukan pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan. - Pengumuman Calon Peserta KSP Lolos Kualifikasi Administrasi dan Teknis Pemilihan Ulang Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Mall dan Hotel yang Terletak di Jl. Malioboro Nomor 52-58 pada tanggal 26 Juni 2024. - Rapat Koordinasi intern pemda DIY terkait penilaian BMD dan cek lokasi BMD - Melakukan perpanjangan perjanjian pemanfaatan rumah dinas - Pada Triwulan II Tahun 2024 telah melakukan penjualan BMD berupa: - Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya, - Kendaraan Bermotor Dinas Operasional. - Hasil Penebangan Pohon - Kendaraan Bus sebanyak 16 Unit. - Bangunan Gudang Tertutup Permanen - Bangunan Rumah Tinggal dan Bangunan Lainnya Hasil Pembebasan Lahan dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Segmen Ngremang-Garongan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit. - Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Kantor - Sisa Bongkaran Material Bangunan di Lingkungan Pemda DIY.</p> <p>Faktor Pendorong : - Penyempurnaan regulasi tentang pemanfaatan barang milik daerah - BMD yang akan di KSP kan posisinya sangat strategis sehingga pada pemilihan ulang peserta pemilihan memenuhi syarat minimal sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 - BMD yang gagal lelang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga laku terjual di TW II 2024</p> <p>Faktor Penghambat : - Proses pengumuman Kerjasama Pemanfaatan BMD yang pertama gagal sehingga terjadi pemilihan ulang. - BMD yang akan dihapus setelah 2 kali lelang melalui KPKNL tidak ada penawar karena nilai yang ditetapkan terlalu tinggi</p>	
						TW 3	3250925400	0	0	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	
						TW 4	9378609475	0	0	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	

No	Sasaran	Indikator Kinerja (Sasaran)	Satuan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan per Triwulan	Keterangan
3	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori RB Perangkat Daerah	Kategori	2	2	TW 1	2	2	100	<p>Keterangan : Realisasi triwulan I menggunakan nilai capaian reformasi birokrasi pada tahun 2023, yaitu kategori A dengan nilai 94,41. Untuk nilai capaian reformasi birokrasi pada tahun 2024 akan diketahui di triwulan 4. Meta indikator : Nilai Kategori Reformasi Birokrasi; AA=1 (Skor >100) ; A=2 (>80 s.d 100) .; BB=3 (>70-80); B=4. (>60-70); CC=5 (>50-60).; C = 6 (>30-50) Upaya yang telah dilakukan yaitu : - Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa, peralatan, perlengkapan, pelayanan, dan rapat untuk pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran - Telah menyelesaikan penyusunan laporan kinerja OPD Tahun 2023 (LKJIP, LKPJ dan LPPD), Perjanjian Kinerja Tahun 2024, RKT Tahun 2025, KAK, Logframe, ROPK, Laporan Keuangan unaudited 2023, dan penyusunan Ranwal RKPD 2025 serta laporan monev bulanan sesuai dengan tatakala waktu yang ditetapkan. Selain itu, sesuai dengan tugas fungsi sebagai SKPKD, BPKA juga berkontribusi dalam penyusunan LKPJ dan LPPD Pemda DIY serta RPJPD dan RKPD Pemda DIY. - Telah dilakukan pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi</p> <p>Faktor Pendorong : 1. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik. 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.</p> <p>Faktor Penghambat : Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah</p>	Meta indikator : Nilai Kategori Reformasi Birokrasi; AA=1 (Skor >100) ; A=2 (>80 s.d 100) .; BB=3 (>70-80); B=4. (>60-70); CC=5 (>50-60).; C = 6 (>30-50)
						TW 2	2	2	100	<p>Keterangan : Realisasi triwulan II menggunakan nilai capaian reformasi birokrasi pada tahun 2023, yaitu kategori A dengan nilai 94,41. Untuk nilai capaian reformasi birokrasi pada tahun 2024 akan diketahui di triwulan 4. Meta indikator : Nilai Kategori Reformasi Birokrasi; AA=1 (Skor >100) ; A=2 (>80 s.d 100) .; BB=3 (>70-80); B=4. (>60-70); CC=5 (>50-60).; C = 6 (>30-50) Upaya yang telah dilakukan yaitu : - Telah melakukan pelayanan publik dan pemenuhan sarana prasarana sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi - Telah menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan audited BPKA DIY tahun 2023, penyusunan Rancangan Akhir RKPD 2025 serta laporan monev bulanan sesuai dengan tatakala waktu yang ditetapkan. - Sesuai dengan tugas fungsi sebagai SKPKD (pengelola keuangan), BPKA telah menyelesaikan Laporan Keuangan Pemda DIY dan memperoleh Opini WTP yang ke-14 kali secara berturut-turut. - Melakukan pelaporan pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE pada triwulan I dan melakukan pemantauan Resiko SPBE pada triwulan II - Melakukan pengisian form SPIP terintegrasi tahun 2024 - Melakukan pelaporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, pengungkapan dugaan pelanggaran, benturan kepentingan, kejadian resiko pada triwulan I dan pemantauan serupa pada triwulan II. -Peningkatan SDM dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh Pemda DIY ataupun Kementerian.</p> <p>Faktor Pendorong : 1. Peningkatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia untuk memberikan kinerja terbaik mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan sebagai satu sistem pengelolaan keuangan daerah yang saling mendukung untuk mencapai kinerja keuangan Pemerintah terbaik. 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung implementasi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi penyempurnaan regulasi maupun berupa fisik sarana prasarana.</p> <p>Faktor Penghambat : Dinamika perubahan kebijakan/peraturan di tingkat Pusat terkait pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah</p>	
						TW 3	2	0	200	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	
						TW 4	2	0	200	<p>Keterangan : -</p> <p>Faktor Pendorong : -</p> <p>Faktor Penghambat : -</p>	